

BIBLIOGRAPHY

A. Books

- Alder, John. 2011. *Constitutional and Administrative Law*. The Macmillan Press. London.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Arief, Barda N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Arief, Barda N. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana. Jakarta.
- Arief, Barda N. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bohm, Robert M. & Haley, Keith N. 2007. *Introduction to Criminal Justice System*. McGraw Hill. New York.
- Djaja, Ermansjah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pusaka. Yogyakarta.
- Fatoni, Syamsul. 2015. *Pembaharuan Sistem Pidana : Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Setara Press. Malang.
- Garner, Bryan & Campbell, Henry. 2004. *Black's Law Dictionary: 8th Edition*. West Publishing Co. Minnesota.
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1997. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni. Bandung
- Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Press. Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad. 2009. *Kebijakan Politik Kriminal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hendropriyono, Abdullah M. 2009. *Terrorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Hiariej, Eddy. 2018. *The Principles of Criminal Law in Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

- Husin, Sukanda. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, Franciscus & Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lampe, Klaus von. 2016. *Organized Crime: analysing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*. SAGE Publications. California.
- Marzuki Peter M. 2005. *Penelitian Hukum*. Pranada Media. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Muladi & Nawawi, Barda. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. PT Alumni. Bandung.
- Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul. 2012. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia. Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.
- Sands, Phillippe et al. 2012. *The Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press. New York.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Publishing. Jakarta.
- Sofyan, Andi & Asis, Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Prenada Media. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Bandung.
- Sudjito. 2017. *Kehutanan Analisis dan Refleksi Yuridis-Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia*. Dialektika. Yogyakarta.
- Sujana, Eggi. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. J.P. Books. Surabaya.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging : dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tauda, Gunawan A. 2011. *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Pranata Hukum. Lampung.
- White, Rob. 2008. *Crimes Against Nature*. Willan Publishing. Devon. UK.
- Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Journals

- Aedi, Ahmad et al. "The Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 (1), 2020.
- Anindito, Laksono. "Potensi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 1 (1), 2014.
- Ariadno, Melda K. "Maritime Security in South East Asia: Indonesian Perspective." *Indonesian Journal of International Studies*, Volume 7 (1), 2009.
- Arif, Anggraeni. "Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan." *Jurisprudentie*, Volume 3 (1), 2016.
- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 (1), 2021.
- Bawono, Bambang & Mashdurohatun, Anis. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging." *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 26 (2), 2011.
- Busroh, Firman. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum*, Volume 13 (2), 2017.
- Christiani, Theresia A. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, Volume 219, 2015.
- Furqon, Eki, "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Nurani Hukum*, Volume 3 (1), 2020.
- Hutabarat, Rugun et al. "Penegakan Hukum Kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Ditinjau dari Perspektif Keadilan Masyarakat Hukum Adat." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 16 (2), 2018.

- Jazuly, Syukron. "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Supremasi Hukum*, Volume 4 (1), 2015.
- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Dinamika Hukum*, Volume 13 (3), 2013.
- Komang Krisnasari & Ketut Mertha. "Penerapan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Volume 1 (3), 2013.
- Kusumaningtyas, Rahajeng & Chofyan, Ivan. "Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 3 (2), 2013.
- Kusumaningtyas, Rahajeng and Chofyan, Ivan. "Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan di Wilayah Kabupaten Subang." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 13 (2), 2013.
- Lynch, Michael J. "Green Criminology and Environmental Crime: Criminology That Matters in the Age of Global Ecological Collapse." *Journal of White Collar and Corporate Crime*, Volume 1 (1), 2020.
- Matnuh, Harpani. "Law as a Tool for Social Engineering." *Atlantis Press*, Volume 147, 2018.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 35 (3), 2005.
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 35 (3), 2005.
- Palage, Marrio. "Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999." *Lex Administratum*, Volume 2 (3), 2014.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Legislasi Indonesia*. Volume 17 (1), 2020.
- Rahmawati, Mety. "Tindak Pidana Terorisme dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002)." *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1 (1), 2006.
- Sathler, Douglas, et al. "Deforestation and Local Sustainable Development in Brazilian Legal Amazonia: An Exploratory Analysis." *Ecology and Society*, Volume 23 (2), 2018.
- Sathler, Douglas, et al. "Deforestation and Local Sustainable Development in Brazilian Legal Amazonia: An Exploratory Analysis." *Ecology and Society*, Volume 23 (2), 2018.
- Sathler, Douglas, et al. "Deforestation and Local Sustainable Development in Brazilian Legal Amazonia: An Exploratory Analysis." *Ecology and Society*, Volume 23 (2), 2018.

- Shobe, Jarrod. "Intertemporal Statutory Interpretation and the Evolution of Legislative Drafting." *Columbia Law Review*, Volume 114 (4), 2014.
- Soedardono, Teguh, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Ilegal Logging." *Jurnal Hukum*, Volume 1 (17), 2010.
- Syahrizal. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing." *Wahana Forestra : Jurnal Kehutanan*, Volume 11 (1), 2016.
- Terjomurti, Kukuh & Sukarmi. "The Critical Study of the Omnibus Bill Based on John Rawls View on Justice." *UNNES Law Journal*, Volume 6 (2), 2020.
- Wicipto, Setiadi, "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4 (2), 2007.

C. Online References

- Agustiyanti. "Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, accessed on 18 June 2021.
- Arinanto, Satya, "Reviving Omnibus Law : Legal Option for Better Coherence." <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-better-coherence.html>, accessed on 19 June 2021.
- Badan Pusat Statistik. "Gini Ratio Maret 2020 tercatat sebesar 0,381." <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1748/gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>, accessed on 8 April 2021.
- CNN Indonesia. "LSM: Penebangan Hutan di Papua Naik Saat Era Jokowi." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211112741-20-605168/lsm-penebangan-hutan-di-papua-naik-saat-era-jokowi>, accessed on 14th June 2021.
- Dahlan Iskan. "Terminal Omni." <https://www.disway.id/r/767/terminal-omni>, accessed on 6 April 2021.
- ICEL. "Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga P3H." <https://icel.or.id/berita/pemerintah-didesak-bentuk-lembaga-p3h/>, accessed on 20 April 2021.
- KLHK RI. "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03%." https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03, accessed on 13th June 2021.
- Maharani, Tsarina. "UU Cipta Kerja Hapus soal 30 Persen Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan." <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/18565731/uu-cipta->

- [kerja-hapus-ketentuan-soal-30-persen-kawasan-hutan-yang-harus](#).
accessed on 20 April 2021.
- Mahiddin, Fitriana et al. “Indonesia Introduces Significant Changes to Mining Law.” <https://www.ssek.com/blog/indonesia-introduces-significant-changes-to-mining-law>, accessed 2 April 2021.
- Maurice Situmorang et al. “Highlights of Amendment to Indonesia Mining Law.” <https://dentons.hprplawyers.com/en/insights/alerts/2020/july/8/high-lights-of-amendment-to-indonesia-mining-law>, accessed on 15 April 2021.
- Mayasari, Irma. “Menggagas Omnibus Law.” <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175/full>, accessed on 18 April 2021.
- Pardomuan, Lewa & Chin, Neo. “How an Illegal Logger Switch to Greener Job Shows a way to Save Indonesia Forests.” <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/illegal-logger-switch-save-indonesia-peat-forest-climate-finance-14346226>, accessed on 9 March 2021.
- Permana, Eric. “Banyak UU Hambat Usaha, Pemerintah Akan Buat Omnibus Law.” <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/banyak-uu-hambat-usaha-pemerintah-akan-buat-omnibus-law/1101481#>, accessed on 18 April 2021.
- Shalihah, Nur F. “Omnibus Law Sudah Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitasnya?” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah-diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya?page=all>, accessed 28th June 2021.
- Shalihah, Nur F. “Omnibus Law Sudah Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitasnya?” <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/09/070300165/omnibus-law-sudah-diterapkan-di-luar-negeri-bagaimana-efektivitasnya?page=all>, accessed 28th June 2021.
- Sipongi. “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021.” http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_ kebakaran, accessed on 17 October 2020.
- Sudjito. “Kehutanan Analisis dan Refleksi Yuridis-Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia.” Dialektika, Yogyakarta.
- Suhardi, Gaudensius. “Obesitas Regulasi.” https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi, accessed on 18 June 2021.
- The World Bank. “Ease of Doing Business Index (1= most business friendly regulations) – Indonesia.” <https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?end=2019&locations=ID&start=2019&view=map>, accessed 8 April 2021.

- The World Bank. “Forest area (sq. km) – Indonesia.”
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?locations=ID&name_desc=false , accessed on 9 November 2020.
- Tsarina Maharani. “UU Cipta Kerja Hapus soal 30 Persen Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan.”
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/18565731/uu-cipta-kerja-hapus-ketentuan-soal-30-persen-kawasan-hutan-yang-harus>, accessed on 20 April 2021.
- Yusti Nurul. “Mantan Anggota Panja : UU P3H Berikan “Affirmative Action” Bagi Peladangan Tradisional.”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10580>, accessed 19 February 2021.

D. Statutes and Regulations

- Act Number 1 of 1946 concerning Indonesian Criminal Code
Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation
Act Number 16 of 2004 concerning Public Attorney General
Act Number 17 of 2004 concerning Kyoto Protocol To the United Nations Framework on Climate Change
Act Number 18 of 2013 concerning Forest Destruction Prevention and Eradication
Act Number 2 of 2002 concerning National Police
Act Number 30 of 2002 concerning KPK
Act Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management
Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics
Act Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal *jo*. Act Number 3 of 2020 concerning Amendment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal
Act Number 41 of 1999 concerning Forestry
Act Number 5 of 2018 Article 43E concerning the Amendment of Act Number 15 of 2003 concerning the implementation of Government in lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Terrorism Act Eradication
Act Number 8 of 1981 concerning Indonesian Procedural Code
Governmental Regulation (GR) Number 45 of 2004 concerning Forestry Protection
PerMenLHK Number P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 concerning Protection and Law Enforcement (Gakkum) Unit organization structure
PERMENPAN Number 21 of 2019 concerning Forestry Police Functional Position

E. Other References

Academic Transcript of Job Creation Bill

Asian Development Bank. "Economic Indicators of Indonesia." obtained on <https://www.adb.org/countries/indonesia/economy>, accessed on 8 April 2021.

Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja, Universitas Gadjah Mada.

Lubuk Pakam District Court decision Number 326/Pid.B-LH/2016/PN-Lbp.

Ministry of Forestry and Environment. "*Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018*." USGS. U.S. Geological Survey. Available online: <https://landsat.usgs.gov/landsat-surface-reflectance-dataproducts>, accessed on 17 June 2021.

Sibolga District Court Judgement Number 243/Pid.Sus/2014/PN.SBG.

Supreme Court decision Number 567/Pid.Sus-LH/2017.

Supreme Court decision Number 965 K/PID.SUS/2015.